



**PERAN PERS DALAM UPAYA MEMBERANTAS  
TINDAKAN PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh**

**Tarsisius Jebaru**

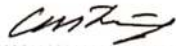


**NPM: 17.75.6215**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO  
2021**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Tarsisius Jebaru  
2. NPM : 17.75.6215  
3. Judul : Peran Pers Dalam Upaya Memberantas Tindakan  
Pidana Korupsi Di Indonesia

4. Pembimbing:

1. Dr. Mathias Daven  
(Penanggung Jawab) : 
2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung : 
3. Dr. Yosef Keladu : 

5. Tanggal diterima : 27 Agustus 2020

6. Mengesahkan :

7. Mengetahui

Wakil Ketua I

  
Dr. Yosef Keladu



Ketua STFK Ledalero

  
Otto Gusti Ndegong Madung

## LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi - Filsafat Agama  
Katolik

Pada

02 Juni 2021

Mengesahkan

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**



KETUA

*Dr. Otto Gusti Ndegong Madung*  
Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

### DEWAN PENGUJI

1. Dr. Mathias Daven

*Mathias Daven*

2. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

*Dr. Otto Gusti Ndegong Madung*

3. Dr. Yosef Keladu

*Yosef Keladu*

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarsisius Jebaru

NPM : 17.75.6215

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **PERAN PERS DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAKAN PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**, yang merupakan satu tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yaitu pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 14 Mei 2021

Yang membuat pernyataan

  
Tarsisius Jebaru

## KATA PENGANTAR

Korupsi merupakan fenomena yang lumrah di tengah masyarakat Indonesia. Korupsi seperti telah dianggap “makan minum” sehingga menjadi suatu keharusan jika seseorang tidak ingin “lapar dan haus”. Dikatakan demikian, karena korupsi di Indonesia sudah menggurita, berkembang biak secara masif dan sistematis. Pelaku dari tindakan ini pun tidak hanya datang dari para pejabat publik tetapi juga para pegawai negeri sipil bahkan kepala desa dan juga kroni-kroninya. Akibat dari tindakan ini, negara ini harus kehilangan uang triliunan rupiah. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin malah diambil oleh para koruptor untuk dirinya dan orang-orang yang ada disekitarnya. Fenomena ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang sering terjadi di negeri ini. Ketidakadilan ini telah membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia selama ini. Oleh karena itu, jika penderitaan ini ingin diberantas maka masyarakat dituntut untuk mencari sebuah solusi agar korupsi di Indonesia dapat diberantas.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menuntut partisipasi dari semua pihak. Salah satunya ialah pers. Pers yang memiliki posisi strategis dapat dimanfaatkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan dan kekuasaan pers sebagai pemilik informasi yang didukung kebebasan yang diberikan kepada pers di Indonesia menjadikan pers sebagai salah satu kekuatan yang dapat diandalkan dalam memerangi tindakan korupsi. Selain karena kedua hal di atas, pers juga ditempatkan sebagai pilar keempat setelah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenyataan ini semakin memperkuat posisi strategis pers di Indonesia. Dengan kenyataan ini, pers di Indonesia dapat diandalkan dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pers dalam minimalisasi masalah korupsi di Indonesia. Mulai dari menyebarkan kasus korupsi secara terus menerus di tengah masyarakat Indonesia, menjadikan pers sebagai media edukasi politik, mengontrol segala kebijakan dari pemerintah, dan juga menciptakan transparansi dalam pengalokasian APBN/APBD serta turut memberitakan secara terbuka tender-tender proyek pembangunan di negeri ini. Beberapa hal ini dapat dilakukan pers dalam upaya minimalisasi masalah korupsi di Indonesia. Oleh

karena itu, sangat dituntut profesionalisme dari pers di Indonesia. Tanpa adanya profesionalisme dari pers di Indonesia maka semua ini mustahil dapat dilakukan pers di negeri ini. Dengan demikian, profesionalisme dari perslah yang menjadi tuntutan utama agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pers.

Penulis melantunkan nada syukur kepada Allah Tritunggal Yang Mahakudus atas segala rahmat dan bimbingan-Nya kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis sungguh menyadari bahwa Tuhan selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dia selalu memberikan kekuatan dan jalan bagi penulis dalam menghadapi kesulitan.

Penulis mengakui bahwa tulisan ini sebenarnya hasil bantuan dari pelbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan yang berguna. Terima kasih kepada Dr. Mathias Daven selaku dosen pembimbing yang selalu dengan setia, sabar, teliti membimbing dan memberikan koreksi yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Terima kasih kepada Dr. Otto Gusti Ndegong Madung yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan memberikan masukan dan koreksi demi perbaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Dr. Yosef Keladu yang bersedia menjadi dosen penguji ketiga.

Terima kasih pula kepada komunitas biara St. Karolus Scalabrinian Maumere yang telah memberikan kesempatan dan inspirasi bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua, bapa Zakarias Praus (Alm) dan mama Sisilia Timat yang telah mendidik dan selalu mendukung penulis. Terima kasih untuk saudara-saudari penulis: saudara Ferdinandus Lantur, saudari Magdalena Setia, saudari Yustina Ratna Sailan, saudara Agustinus Bahagia, saudara Yohanes Penno, dan saudara Flavianus Mujur yang telah mengajarkan penulis tentang hangatnyanya sebuah keluarga. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Ndajang, secara khusus kepada bapak Martinus Kaimilo dan mama Kristina Setia yang telah memotivasi dan mendukung penulis baik secara moral maupun finansial.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan konstruktif dari semua pihak dalam menyempurnakan tulisan ini.

Ledalero 14 Mei 2021

Penulis

## ABSTRAK

Tarsisius Jebaru. 17.75.6215. **Peran Pers Dalam Upaya Memberantas Tindakan Pidana Korupsi Di Indonesia.** Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peran pers dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek yang diteliti adalah peran pers dalam upaya memberantas tindakan pidana korupsi di Indonesia. Dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia, pers dapat memanfaatkan kebebasannya yang telah dijamin Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Kebebasan pers yang telah dijamin Undang-Undang ini didukung pula dengan kenyataan bahwa pers di negara demokrasi ditempatkan sebagai pilar keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kekuatan lain dari pers dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ialah adanya kemampuan untuk menggiring opini publik. Pers dapat dengan mudah mengangkat seseorang menjadi terkenal, membantunya mencapai tampuk kekuasaan sekaligus menurunkan secara tidak langsung dari takhta kekuasaannya itu. Inilah alasan fundamental yang menjadikan pers di Indonesia dapat diandalkan dalam upaya minimalisasi masalah korupsi di negeri ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran pers dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan apabila pers di Indonesia secara profesional menjalankan tugasnya setiap hari. Ada empat point penting yang dapat dilakukan pers dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Pertama*, pers dapat menyebarkan kasus korupsi secara terus menerus di tengah masyarakat Indonesia sehingga mempermalukan pelaku dan di saat yang sama mampu meruntuhkan pemimpin yang korup. *Kedua*, menjadikan media sebagai media edukasi politik agar masyarakat mampu memilih pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab. *Ketiga*, pers dapat dijadikan pengontrol kebijakan pemerintah agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya. *Keempat*, pers dapat menciptakan transparansi dalam pengalokasian APBN/APBD serta turut memberitakan secara terbuka tender-tender proyek pembangunan agar masyarakat dapat mengontrol pengelolaannya.

**Kata kunci:** *Pembangunan, Korupsi dan Pers.*



## ABSTRACT

Tarsisius Jebaru. 17.75.6215. **The Role of the Press in Efforts to Eradicate Corruption in Indonesia.** Thesis. Undergraduate Program, Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy. 2021.

This research aims to examine the extent of the role of the press in efforts to eradicate corruption in Indonesia.

The method used in this study is descriptive method. The object studied is the role of the press in efforts to eradicate corruption in Indonesia. In an effort to eradicate corruption in Indonesia, the press can take advantage of its freedom that has been guaranteed by Law No. 40 of 1999 on the press. The freedom of the press that has been guaranteed by this Law is also supported by the fact that the press in a democratic country is placed as the fourth pillar after the executive, judiciary, and legislature. Another force of the press in efforts to eradicate corruption in Indonesia is the ability to drive public opinion. The press can easily elevate a person to prominence, helping him achieve power while abdicating indirectly from the throne of power. This is the fundamental reason that makes the press in Indonesia reliable in efforts to minimize the problem of corruption in the country.

Based on the results of this study, it was concluded that the role of the press in efforts to eradicate corruption in Indonesia can be done if the press in Indonesia professionally performs its duties every day. There are four important points that the press can do in efforts to eradicate corruption in Indonesia. *First*, the press can spread corruption cases continuously in Indonesian society so as to humiliate the perpetrators and at the same time be able to undermine corrupt leaders. *Second*, make the media as a medium of political education so that the public can choose a clean and responsible leader. *Third*, the press can be used as a controller of government policy so that the government does not abuse its power. *Fourth*, the press can create transparency in allocating state budgets and also publicly announce tenders for development projects so that the community can control its management.

**Keywords: Development, Corruption and the Press.**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
<b>1.4 Metode Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PERS DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Pengantar .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Sekilas Tentang Pers.....</b>	<b>10</b>
2.2.1 Pengertian Pers.....	10
2.2.1.1 Secara Etimologis .....	10
2.2.1.2 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .....	11
2.2.1.3 Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 .....	11
2.2.1.4 Pengertian Menurut Para Ahli.....	12
2.2.1.4.1 Menurut Djuroto .....	12
2.2.1.4.2 Menurut Oemar Seno Adji.....	12
2.2.1.5 Kesimpulan .....	12
2.2.2 Sistem Pers Dunia .....	13
2.2.2.1 Sistem Pers Otoriter .....	13
2.2.2.2 Sistem Pers Liberal .....	14
2.2.2.3 Sistem Komunis Soviet.....	15
2.2.2.4 Sistem Tanggung Jawab Sosial.....	16
2.2.3 Perkembangan Sistem Pers di Indonesia.....	17
2.2.3.1 Masa Perjuangan .....	18
2.2.3.2 Masa Orde Lama .....	19
2.2.3.3 Masa Orde Baru .....	20
2.2.3.4 Era Reformasi.....	22
<b>2.3 Pembangunan di Indonesia.....</b>	<b>23</b>
2.3.1 Konsep Pembangunan.....	23
2.3.1.1 Kompleksitas Pengertian Pembangunan .....	23
2.3.1.1.1 Teori Modernisasi .....	24
2.3.1.1.1.1 Konsep dasar .....	24

2.3.1.1.1.2 Kritik Amartya Sen terhadap Teori Modernisasi .....	24
2.3.1.1.2 Teori Dependensi .....	26
2.3.1.1.2.1 Penjernihan Konsep .....	26
2.3.1.1.2.2 Kritik Terhadap Teori Dependensi.....	27
2.3.1.1.3 Pembangunan sebagai Peniadaan Derita.....	27
2.3.1.1.3.1. Penderitaan dan Ikut Menderita sebagai Dasar Etika Pembangunan.	27
2.3.1.1.3.2. Ciri Khas serta Orientasi Praktis Pembangunan yang Menempatkan Penderitaan sebagai Basis Etisnya .....	28
2.3.1.1.4 Pembangunan sebagai Ketiadaan Kebebasan .....	30
2.3.1.1.4.1 Kemiskinan sebagai Ketiadaan Kebebasan.....	30
2.3.1.1.4.2 Kemiskinan sebagai Masalah Kapabilitas .....	31
2.3.1.1.5 Kesimpulan .....	32
2.3.2 Perkembangan Pembangunan di Indonesia .....	32
2.3.2.1 Orde Lama.....	33
2.3.2.2 Orde Baru .....	34
2.3.2.3 Era reformasi.....	35
<b>2.4 Kesimpulan .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III MENEROPONG FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA.....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Pengantar .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2 Pengertian Korupsi .....</b>	<b>38</b>
3.2.1 Pengertian Secara Etimologis .....	38
3.2.2 Pengertian Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 .....	39
3.2.3 Pengertian Menurut <i>Transparency International</i> .....	40
3.2.4 Pengertian Menurut Para Ahli.....	40
3.2.4.1 Pengertian Menurut Sudomo.....	40
3.2.4.2 Syed Husein Alatas .....	41
3.2.5 Kesimpulan .....	42
<b>3.3 Bentuk-Bentuk Korupsi .....</b>	<b>42</b>
3.3.1 Penyuapan .....	42
3.3.2 Pemerasan .....	43
3.3.3 Penggelapan .....	44
3.3.4 Nepotisme .....	44
3.3.5 Gratifikasi.....	45
<b>3.4 Sebab-Sebab Korupsi .....</b>	<b>46</b>
3.4.1 Pola Hidup Mewah.....	46
3.4.2 Rendahnya Kesadaran Moral Pelaku .....	47
3.4.3 Tekanan Ekonomi .....	47
3.4.4 Ketidakpastian Hukum.....	48
<b>3.5 Fenomena Korupsi di Indonesia.....</b>	<b>49</b>
<b>3.6 Dampak yang Ditimbulkan dari Tindakan Korupsi .....</b>	<b>54</b>
3.6.1 Terhadap Ekonomi.....	55
3.6.2 Terhadap Penegakan Hukum .....	56
3.6.3 Terhadap Moral.....	57
<b>3.7. Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>

<b>BAB IV UPAYA PERS DALAM USAHA MEMERANGI MASALAH KORUPSI DI INDONESIA .....</b>	<b>60</b>
<b>4.1 Pengantar .....</b>	<b>60</b>
<b>4.2 Fungsi Pers.....</b>	<b>61</b>
4.2.1 Sebagai Media Informasi .....	61
4.2.2 Sebagai Media edukasi.....	61
4.2.3 Sebagai Media Kontrol Sosial.....	62
4.2.4 Sebagai Media Hiburan.....	63
4.2.5 Sebagai Lembaga Ekonomi .....	63
<b>4.3 Peran Pers Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 .....</b>	<b>63</b>
<b>4.4 Kekuatan Pers .....</b>	<b>64</b>
4.4.1 Sebagai Pilar Keempat Negara Demokrasi .....	64
4.4.2 Menggiring Opini Publik .....	65
<b>4.5 Mencegah Terjadinya Korupsi di Indonesia Melalui Pers .....</b>	<b>65</b>
4.5.1 Menyebarkan Berita Seputar Kasus Korupsi .....	66
4.5.2 Media Edukasi Politik.....	67
4.5.3 Pengontrol dan Pengawasan Kebijakan Pemerintah.....	68
4.5.4 Menciptakan Transparansi .....	70
<b>4.6 Tantangan yang Dihadapi Pers di Indonesia .....</b>	<b>71</b>
4.6.1 Suap.....	71
4.6.2 Kekerasan.....	72
4.6.3 Intervensi dari Pemilik Saham .....	73
<b>4.7 Sikap Dasar yang Harus Dimiliki Pers dalam Minimalisasi Tantangan yang Dihadapinya .....</b>	<b>74</b>
<b>4.8 Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>5. 2. Usul Saran.....</b>	<b>80</b>
5.2.1. Pers.....	80
5.2.2. Pemerintah.....	81
5.2.3. Masyarakat .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>